

Kajian Ruang Kepegawaian Di Gedung Komisi Nasional Disabilitas Dalam Konsep Desain Inklusif

Rachmita Maun Harahap^a, Chandrarezky Permatasari^b, Arina Hayati^c, Kirami Bararatin^d

^{ab}Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

^{cd}Institut Teknologi Sepuluh Noverember Surabaya, Indonesia
rachmita.mh@mercubuana.ac.id

Keywords:

people with disability;
workspace of Komisi Nasional Disabilitas (KND);
inclusive design; deaf space
penyandang disabilitas;
ruang kerja Komisi Nasional Disabilitas;
desain inklusif;
deaf space

Abstract

The study aims to identify the design aspects of the workspace based on the experience of people with disabilities. The workspace of Komisi Nasional Disabilitas (KND) which is located on the first floor will be the priority of this case study. The study examines how to implement the inclusive design concept in the workplace focusing on equal opportunities in the implementation of Respect, Protection, and Fulfillment of Persons with Disabilities Rights. The research used a qualitative approach. Architectural elements measurement based on Universal Design and Deaf Space principles. A quantitative approach is also used to measure the values of the environment. The result shows that during the observation, the informant reveals the KND space has not been designed with the two principles. Even so, it mostly has some physical adjustments of space arrangements to meet informants' conditions, needs, and preferences to carry out their daily activities independently.

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi aspek desain ruang kerja berdasarkan pengalaman penyandang disabilitas. Ruang kerja Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang berada di lantai satu akan menjadi kasus prioritas kajian ini. Kajian ini akan mengkaji bagaimana penerapan konsep desain inklusif di tempat kerja yang berfokus pada mewujudkan kesetaraan kesempatan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengukuran elemen arsitektur berdasarkan prinsip desain universal dan Deaf Space. Pendekatan kuantitatif juga digunakan mengukur nilai-nilai lingkungan kerja, Hasil penelitian menunjukkan informan berperan penting untuk mengevaluasi lingkungannya. Selama observasi informan mengungkapkan ruangan KND tidak dirancang dengan kedua prinsip tersebut. Para informan sebagian besar harus melakukan beberapa penyesuaian fisik dan penataan ruangan sesuai kebutuhannya, dan preferensi mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

Journal of Disability Studies
INKLUSI

doi Vol. 09, No. 02, 2022

10.14421/ijds.090203

Submitted: 14 Oct 2022

Accepted: 30 Des 2022



A. Pendahuluan

Gedung Komisi Nasional Disabilitas (KND) berkomitmen mewujudkan ruang kerja yang ramah atau inklusif bagi penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan UU No.8/2016, pasal 18 tentang Hak Aksesibilitas. Presiden RI telah mengesahkan dua peraturan nomenklatur turunan dari UU No.8/2016, yaitu Peraturan Pemerintah No.42/2020 tentang Aksesibilitas dan Pelayanan Publik, dan Peraturan Pemerintah No.60/2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Kedua peraturan tersebut baik pemerintah pusat maupun daerah serta pihak pemangku kepentingan terkait wajib menyediakan fasilitas ruang kerja yang ramah bagi penyandang disabilitas (Pramashela & Rachim, 2021). Termasuk elemen-elemen arsitektur di ruang kerja disesuaikan dengan kebutuhan ragam penyandang disabilitas, sehingga tidak membatasi pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan observasi, survei dan evaluasi yang telah dilakukan, elemen arsitektur pada ruang kepegawaian di gedung KND bagi komisioner dan staf khusus penyandang disabilitas masih belum inklusif dan masih terdapat beberapa elemen yang masih belum akomodatif terhadap pengguna penyandang disabilitas. Ruang kepegawaian di gedung KND belum memenuhi prinsip deaf space dan Permen PUPR PUPR RI No.14/PRT/M/2017. Alasan utama ruang kepegawaian KND dipilih dalam penelitian ini karena ruangan tersebut merupakan kantor pusat KND yang ditempati oleh tujuh orang komisioner KND yang empat orang di antaranya adalah penyandang disabilitas ditambah satu staf khusus yang juga seorang penyandang disabilitas. Tentunya desain ruang kerja yang inklusif dan ramah penyandang disabilitas dapat mendukung lingkungan kerja yang kondusif dan produktif bagi ketujuh komisioner yang bekerja dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas-tugasnya dengan baik. Desain ruang kerja KND ini juga dapat menjadi desain percontohan bagi gedung Komisi Daerah Disabilitas (KDD) di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota madya. Oleh karena itu pemenuhan hak aksesibilitas di tempat kerja wajib dipenuhi termasuk aksesibilitas bagi ketujuh komisioner yang bekerja di ruang KND sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU No.8 Tahun 2016.

Selain itu, evaluasi terhadap elemen arsitektur pada ruang kepegawaian di gedung KND juga ditinjau dari segi desain inklusif bagi komisioner yang memiliki hambatan fisik (kedua tangan amputasi dan satu kaki amputasi), hambatan penglihatan, hambatan pendengaran serta hambatan intelektual. Hasil temuan elemen-elemen arsitektur di ruang kepegawaian dianalisis dan dikomparasi dengan konsep desain inklusif melalui prinsip desain universal sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri PUPR RI No.14/PRT/M/2017 dan prinsip *Deaf Space* (Harahap & Lelo, 2020).

Penerapan konsep desain inklusif pada ruang kepegawaian di gedung KND penting untuk dikaji pada elemen-elemen arsitektur yang berkaitan dengan pengalaman komisioner dan staf khusus penyandang disabilitas sebagai pengguna.

Hal ini karena, pengguna disabilitas memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi termasuk hak pekerjaan dan hak aksesibilitas di tempat kerja. Sudah menjadi kewajiban negara untuk mendorong percepatan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif (Istifarroh & Nugroho, 2019). Selain itu, penghargaan dan apresiasi atas prestasi kerja bagi penyandang disabilitas masih sedikit, maka masyarakat perlu mendorong penyediaan fasilitas dan aksesibilitas di dunia kerja sebagai bagian dari apresiasi bagi penyandang disabilitas di dunia kerja (Bonaccio dkk., 2020).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Cresswell & Fawaid, 2017). Teknis pengumpulan data primer dengan cara, yaitu: 1) observasi partisipatif untuk mengidentifikasi kondisi elemen arsitektur pada ruang kepegawaian di gedung KND; 2) survei guna mengidentifikasi ragam penyandang disabilitas pengguna ruang; 3) wawancara mendalam untuk memperoleh informasi lengkap dan detail tentang ragam disabilitas. Data sekunder berupa studi literatur, jurnal, pedoman peraturan pemerintah, dan artikel yang relevan.

Objek penelitian adalah ruang kepegawaian di gedung KND, berlokasi di Cawang Jakarta Timur, karena gedung tersebut belum ramah penyandang disabilitas atau belum inklusif disabilitas. Saat itu, ruang kepegawaian sudah direnovasi setelah pelantikan Komisioner KND 1 Desember 2021. Namun, beberapa elemen arsitektur tersebut yang belum sesuai dengan kebutuhan ragam penyandang disabilitas. Padahal komisioner sudah mengusulkan ruangan tersebut sebaiknya diterapkan konsep desain inklusif melalui pedoman desain universal dan deaf space.

Hasil observasi fisik dan wawancara diidentifikasi sambil direduksi berdasarkan kriteria permasalahan yang ditetapkan, kemudian dianalisis seluruhnya melalui pendekatan interaksi yang dikaitkan dengan permasalahan elemen arsitektur di ruang kepegawaian tersebut, dan dilanjutkan dengan mendalam setiap aspek untuk dapat dianalisis sesuai permasalahan. Hasil Akhir yang dicapai merupakan teori substantif, kemudian disimpulkan dan direkomendasikan untuk dapat dilanjutkan pada penelitian berikutnya.

C. Temuan dan Analisis

Tahap awal dilakukan wawancara dengan komisioner dan staf khusus KND terhadap akses ruang kepegawaian di gedung KND. Wawancara dilakukan dengan mengklasifikasikan menjadi 3 kelompok disabilitas, yaitu disabilitas fisik (daksa), disabilitas sensorik penglihatan dan disabilitas sensorik pendengaran.

Analisis data survei evaluasi penerapan elemen desain inklusif di ruang

kepegawaian di gedung KND yang dilaksanakan dalam waktu satu hari pada tanggal 20 April 2022. Kegiatan survei dimulai pukul 09.00 sampai dengan selesai pukul 16.30. Kegiatan diawali dengan rapat kecil oleh empat tim peneliti dari Desain Interior Universitas Mercu Buana (UMB) dan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) yang dibantu 5 mahasiswa Jurusan Desain Interior Universitas Mercu Buana serta empat narasumber dari KND. Empat narasumber terdiri dari tiga dari anggota Komisioner KND dan satu dari staf khusus KND dengan kondisi disabilitas berbeda. Hal ini bertujuan untuk mengetahui elemen-elemen arsitektur pada ruang kepegawaian di gedung KND sesuai dengan ragam penyandang disabilitas. Salah satu tim peneliti dari ITS juga merupakan penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Berikut adalah nama-nama yang terlibat sebagai bagian dari tim peneliti.

1. Dr. Rachmita M. Harahap, ST, M.Sn sebagai ketua tim riset dari UMB
2. Rr. Chandrarezky P., SSn, MDs sebagai anggota tim riset dari UMB
3. Dr. Arina Hayati, S.T., M.T. sebagai ketua tim mitra dari ITS
4. Kirami Bararatin, S.T., M.T. sebagai anggota tim mitra ITS

Sementara nama-nama narasumber yang terlibat dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1
Narasumber dari Komisioner dan Staff Khusus KND

No	Nama	Jenis Disabilitas
1	Jonna Damanik (kemampuan penglihatan menurun sejak tahun 2007)	Komisioner Disabilitas Netra
2	Fatimah Asri (mengalami kecelakaan saat berusia 23 tahun, dua tangan diamputasi)	Komisioner Disabilitas Daksa
3	Dr. Rachmita M. Harahap, ST, M.Sn (disabilitas rungu sejak lahir)	Komisioner Disabilitas Rungu
4	Dodik Purwanto (staf khusus, mengalami kecelakaan yang berakibat salah satu kaki amputasi)	Staf Khusus Disabilitas Daksa

Tim peneliti dari ITS memperkenalkan semua tim peneliti dalam rapat tim peneliti, dilanjutkan dengan pemaparan tujuan dan agenda acara survei evaluasi serta diskusi awal tentang isu aksesibilitas dan disabilitas. Paparan pertama menjelaskan tentang konsep desain inklusif melalui tujuh prinsip desain universal dan lima prinsip deaf space. Ada beberapa pengertian desain universal yang secara prinsip sama namun berbeda dari beberapa sumber. Menurut Ronald Mace dkk., (1991) definisi *Universal design* adalah desain yang merancang semua produk bangunan, dan ruang eksterior agar dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin (Mace dkk.,

1991). *Universal design* dapat didefinisikan sebagai desain produk dan lingkungan yang dapat digunakan semaksimal mungkin oleh orang-orang dari berbagai kelompok usia dan kemampuan (Story dkk., 1998). Defenisi lain, *universal sesign* adalah sebuah proses yang memungkinkan dan memberdayakan populasi yang beragam dengan meningkatkan kinerja manusia, kesehatan, dan kesejahteraan, serta partisipasi sosial (Steinfeld & Maisel, 2012). Sementara itu menurut Goldsmith (2000) *universal design* adalah rancangan yang didesain oleh para perancang dapat memberikan akomodasi secara universal sehingga dapat digunakan dengan nyaman oleh semua penggunanya (Goldsmith, 2000).

Sementara prinsip *deaf space* dikembangkan oleh Hansel Bauman (2005) yang telah digunakan pada desain ruangan bangunan institusi Universitas Gallaudet yang diperuntukan bagi mahasiswa Tuli (Bauman, 2005). Ada lima prinsip *Deaf Space* hampir berbeda dari sumber, yaitu 1) *space and proximity*; 2) *sensory reach*; 3) *mobility and proximity*; 4) *light and color*; dan *acosutic* (Bauman, 2005). Menurut Basem Doudin (2019), prinsip *deaf architecture*, yaitu 1) *space*; 2) *light*; 3) *compositien*; 4) *form*; dan 5) *materiality* (Doudin, 2010). Kedua pedoman tersebut mempunyai arti yang sama dalam memberikan instruksi pada bangunan.

Berikut diberikan instruksi bagaimana kegiatan survei dan evaluasi dilakukan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan dalam kedua pedoman tersebut.

1. Kasus yang didiskusikan adalah gedung KND dan lingkungan/fasilitas pendukungnya.
2. Diskusikan permasalahan lingkungan dari kesan, saran dan keinginan pengguna disabilitas dengan ragam usia/gender – disabilitas ganda (misalkan penyandang disabilitas netra dan lansia, atau daksa dan wanita/laki-laki) dan evaluasi dikaitkan dengan kedua pedoman tersebut.
3. Luaran adalah identifikasi permasalahan, potensi serta dokumentasi visual dari simulasi penggunaan fasilitas dari beragam disabilitas dan kebutuhan.

Tim peneliti dan mahasiswa juga dibagi saat melakukan survei dan wawancara untuk mempermudah proses penelitian dalam waktu yang terbatas. Tim tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 2.

Tabel 2

Daftar pembagian kelompok survei dan wawancara

Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3
Narasumber: Jonna Damanik	Narasumber: Fatimah Asri dan Dodik Purwanto	Narasumber: Rachmita MH
Peneliti: Kirami Bararatin	Peneliti: Arina Hayati	Peneliti: Rachmita M. Harahap dan Rr. Chandrarezky P
Mahasiswa: Shinta dan Anzor	Mahasiswa: Dodi dan Devrian	Mahasiswa: Anggina dan Cika

1. Data Wawancara dan Survei dari 3 Tim Kelompok

a. Kelompok 1

Kelompok 1 dipandu oleh peneliti Kirami Bararatin dari ITS. Narasumber yang diwawancarai adalah salah satu dari komisioner KND Bapak Jonna Aman Damanik yang merupakan penyandang disabilitas Netra. Pada sesi wawancara yang berjalan selama $\pm 1,5$ jam, peneliti dibantu oleh dua mahasiswa Shinta dan Anzor untuk mendokumentasikan dan membuat catatan. Hasil wawancara dengan Bapak Jonna terhadap aksesibilitas di ruang KND sebagai seorang disabilitas Netra. Saat beraktivitas di kantor, Jonna banyak dibantu oleh pendamping yang beliau anggap sebagai bentuk AYL (Akomodasi yang Layak). Meskipun demikian beliau tetap mengenali dengan baik lingkungan fisik tempat beliau bekerja dan bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Namun karena pekerjaan beliau sering menuntut kecepatan dan kesigapan yang tinggi, keberadaan AYL ini sangat dibutuhkan terutama saat membalas pesan, membaca pesan atau informasi dan mengetik. Itulah mengapa pendamping yang beliau pilih sendiri adalah benar-benar orang yang dipercaya karena tidak jarang informasi yang perlu diketahui bersifat rahasia.

Secara garis besar hasil evaluasi beliau terhadap lingkungan fisik tempat bekerja adalah sebagai berikut:

1) Approach

Narasumber dapat melalui trotoar yang ada di depan site mencapai kantor KND, lalu dilanjutkan melewati gerbang melalui jalan beraspal yang menanjak. Jalur pedestrian tidak menerus sehingga narasumber menggunakan jalur yang sama dengan kendaraan. Pada dasarnya narasumber lebih sering diantarkan langsung ke depan pintu masuk (*entrance*) ketimbang ke depan gerbang lingkungan gedung KND, sehingga proses masuk lingkungan gedung tidak menjadi permasalahan meskipun trotoar yang ada tidak dilengkapi dengan *guiding block*. Selain ketersediaan elemen fisik, keberadaan orang lain yang siap membantu juga menjadi aspek aksesibilitas yang sangat membantu.

2) Entrance (pintu masuk)

Sebelum mencapai pintu masuk terdapat dua anak tangga dengan ketinggian 10 cm yang harus dilewati. Menurut narasumber, kondisi permukaan lantai tersebut masih aksesibel, informasi seperti tekstur permukaan dari penggunaan material yang berbeda seperti lantai marmer dan karpet dapat digunakan sebagai petunjuk sebuah posisi. Karpet (keset) menunjukkan posisi tepat di depan pintu kaca otomatis. Perubahan suasana (suara, tekanan udara, temperatur) juga menjadi penanda lokasi ruang.

3) Hall dan lobby

Ruang *lobby* dan *hall* memiliki dimensi yang cukup lebar sehingga memudahkan pergerakan narasumber. Narasumber bernavigasi di dalam dan antar ruangan, narasumber menggunakan jumlah langkah kaki, jangkauan terhadap perabot dan warna kontras pada dinding sebagai petunjuk. Hal yang menurut beliau masih perlu ditambahkan adalah penggunaan *guiding block* pada interior bangunan yang bisa sangat membantu dalam bergerak/bernavigasi.

4) Ruang kerja

Ruang kerja berukuran 3 x 4 m menurut beliau sudah cukup luas dan penataan perabot juga sudah memudahkan dalam bergerak. Namun elemen dinding sebagai partisi antar ruang perlu ditutup secara sempurna hingga ke bagian plafond begitu juga dengan akses keluar masuk perlu memiliki daun pintu agar suara dari luar tidak masuk ke dalam ruangan beliau. Derajat ketertutupan ruang yang tinggi tidak hanya bertujuan untuk menjaga privasi namun yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan informasi. Pencahayaan tidak menjadi unsur yang penting bagi narasumber namun warna yang kontras bisa sangat membantu untuk memberi petunjuk wayfinding. Warna cat dan lis dinding yang ada saat ini belum terlalu kontras.

5) Fasilitas pendukung lain

Fasilitas pendukung seperti dapur/*pantry*, kantin, tempat parkir menurut beliau sudah cukup baik hanya penataan perabotnya perlu disesuaikan lagi dengan jangkauan dan ruang gerak narasumber. Narasumber tidak mengalami kendala dalam menggunakan kamar mandi/toilet. Hal yang perlu ditingkatkan adalah penggunaan *guiding block* yang bisa membantu mengarahkan pergerakan ke fasilitas-fasilitas tersebut.

b. Kelompok 2

Kelompok 2 dipandu oleh peneliti Arina Hayati dari ITS dan juga sebagai penyandang disabilitas fisik (polio menggunakan kruk dan kursi roda). Narasumber yang diwawancarai adalah satu dari Komisioner KND atas nama Fatimah Asri sebagai

penyandang disabilitas dengan amputasi di dua tangan dan Staf Khusus Dodik Purwanto sebagai penyandang disabilitas dengan amputasi kaki kanan. Pelaksanaan wawancara dibantu oleh mahasiswa Devrian dan dilakukan selama 1,5 jam. Berikut adalah hasil wawancara dengan kedua narasumber terhadap aksesibilitas di ruang KND sebagai seorang disabilitas fisik.

Pendapat kedua narasumber cukup berbeda saat memberikan evaluasi terhadap ruang kepegawaian di gedung KND. Narasumber pertama, Fatimah Asri, berpendapat ruang kantor di gedung KND cukup akses dan terutama fasilitas toilet. Menurut narasumber pertama, fasilitas toilet yang diharapkan adalah toilet dengan dimensi ruang yang luas agar asisten pendamping yang membantu narasumber saat beraktivitas di dalam toilet bisa bergerak dan membantu narasumber dengan maksimal. Sementara ruang kantor, menurut narasumber, narasumber merasa kurang nyaman saat menggunakan furnitur yang disediakan sehingga perlu mengubah penataan furnitur agar sesuai dengan kebutuhan beliau. Narasumber menggunakan kedua kaki saat mengoperasikan *handphone*, maka narasumber lebih memilih melakukan aktivitas mengetik di bawah/di lantai dengan beralas tikar/karpet yang sebenarnya sudah disediakan saat narasumber mengikuti tes masuk sebagai calon Komisioner KND. Saat aktivitas mengetik dibantu oleh staf khusus, narasumber baru akan menggunakan kursi dan meja yang disediakan.

Lain halnya dengan narasumber kedua yaitu Dodik Purwanto, berpendapat tidak menemukan permasalahan aksesibilitas baik di ruang kepegawaian gedung KND. Karena beliau hanya amputasi satu kaki dan dibantu dengan menggunakan kaki palsu prostetik, beliau tidak mengalami kesulitan saat melakukan mobilitas. Namun, karena saat ini kaki palsu beliau kondisinya sedikit turun dan tinggi tidak sama dengan kaki yang satunya, maka narasumber kedua sedikit mengalami hambatan saat berjalan, namun masih dapat diatasi.

Saat wawancara selesai dilakukan, peneliti mengajak kedua narasumber untuk melakukan survei, simulasi dan menunjukkan beberapa aktivitas baik di dalam ruang kantor maupun di luar kantor dan di sekeliling gedung KND. Narasumber pertama melakukan evaluasi dan simulasi di ruang toilet, narasumber memperagakan bagaimana mengambil air wudhu dan beraktivitas di ruang toilet. Dimensi toilet yang cukup luas ($\pm 4,5 \text{ m}^2$), sehingga narasumber dan asisten pendampingnya mudah melakukan mobilitas baik terutama saat menggunakan wastafel untuk wudhu. Di ruang toilet terdapat keran yang disediakan untuk menampung air dan juga terkadang untuk wudhu. Namun, menurut narasumber pertama, posisi dan ketinggian keran rendah dan sulit digunakan saat melakukan rangkaian gerakan wudhu, kecuali hanya bisa dimanfaatkan untuk mencuci kedua kakinya. Evaluasi peneliti yang juga sebagai pengguna kursi roda, ruang toilet cukup luas dan kursi roda dapat masuk dan bermanuver dengan mudah. Namun, peletakan railing/pegangan toilet cukup tinggi sehingga kurang dapat digunakan dengan maksimal oleh peneliti, yang seorang

pengguna kursi roda, saat mencoba toilet duduk yang tersedia. Posisi wastafel yang menonjol dan tinggi tanpa disertai ruang di bawah wastafel yang cukup untuk kursi roda, juga cukup menyulitkan peneliti. Peneliti harus berdiri terlebih dahulu, namun cukup kesulitan karena bentuk wastafel yang menonjol dan sulit untuk menopang kedua tangan di area sekitar wastafel. Lantai toilet juga relatif licin dan juga cenderung basah karena adanya keran air yang dekat dengan toilet duduk.

Sedangkan menurut narasumber kedua, saat beraktivitas di toilet tidak mengalami kendala dan sesuai dengan kondisi beliau. Saat tim peneliti dan narasumber melakukan survei di luar ruang kantor ada beberapa hasil diskusi dan pengamatan yang kurang sesuai dengan pendapat awal saat wawancara. Saat melakukan survei bersama peneliti yang menggunakan kursi roda beberapa catatan terhadap kondisi bangunan kantor dan sekitar kantor sebagai berikut.

- 1) Pintu masuk ke ruang kantor KND sangat nyaman dan akses karena merupakan pintu otomatis dengan dimensi yang lebar.
- 2) Area ruang resepsionis dan lobi KND, terdapat tangga menuju lantai dua, menurut narasumber yang seorang pengguna kruk, kondisi pada railing tangga tidak nyaman. Hal ini dikarenakan pegangan railing tangga cukup besar dan tidak mudah dicengkeram oleh pengguna. Selain itu material pegangan yang dari stainless steel menambah sifat licin dan kurang nyaman dipegang. Posisi railing juga tidak dimulai di anak tangga pertama dan kurang membantu pengguna saat menaiki tangga di anak tangga pertama.
- 3) Ruang resepsionis tidak mudah terlihat karena berada di sisi kiri pintu masuk utama dan posisi di bawah anak tangga. Namun, ketinggian meja resepsionis nyaman bagi pengguna kursi roda. Area di sekitar ruang resepsionis masih belum ada tanda petunjuk ke ruang-ruang yang di dalam KND dan juga tidak ada guiding block/ubin pemandu untuk membantu penyandang disabilitas netra sebagai pengarah ke ruang-ruang penting termasuk ke area tangga.
- 4) Pintu masuk utama relatif besar dan memiliki sistem otomatis sehingga memudahkan pengguna penyandang disabilitas, namun area lantai antara anak tangga menuju pintu masuk masih kurang luas terutama untuk pengguna kursi roda.
- 5) *Ramp* disediakan di sisi kiri dari pintu masuk utama dengan dimensi lebar yang cukup. Namun, kemiringan ram lebih dari 8 derajat dan cukup sulit digunakan oleh pengguna kursi roda secara mandiri dan harus dibantu dan didorong oleh asisten. Ruang antara ramp dan pintu masuk utama juga kurang bebas hambatan karena adanya pot bunga yang relatif besar dan diletakkan tepat setelah ramp menuju ke pintu masuk utama.
- 6) Jalan di sekitar KND cukup akses dengan permukaan yang datar dengan material yang masih mudah untuk dilalui oleh kursi roda. Namun tidak ada tanda petunjuk untuk memberikan informasi posisi Gedung dan ruang kerja Komisioner KND

- 7) Saat pengunjung memasuki kompleks bangunan KND, pintu masuk utama kurang akses dan memiliki kemiringan yang cukup tajam. Hal ini tidak memungkinkan pengguna kursi roda untuk memasuki lokasi kompleks KND dari jalan raya/trotoar di luar kompleks bangunan. Trotoar dari luar kompleks bangunan juga tidak menerus ke dalam bangunan kompleks, sehingga pengguna pejalan kaki harus menggunakan area jalan untuk kendaraan.
- 8) Trotoar di sekitar jalan raya dan pintu masuk memiliki dua kondisi, satu sisi memiliki dimensi yang sesuai dengan material yang baik. Sedangkan di sisi lain, dimensi trotoar tidak cukup dengan material yang kurang sesuai. mulai dari trotoar menuju ke pintu masuk KND tidak cukup landai sehingga cukup sulit digunakan oleh pengguna kursi roda tanpa bantuan.

Berdasarkan hasil observasi bersama, kedua narasumber dan peneliti yang merupakan pengguna kursi roda serta tim mahasiswa dapat diketahui kondisi dan kualitas aksesibilitas di sekitar bangunan dan di dalam bangunan Cawang Kencana, tempat Kantor KND. Saat observasi dilakukan terlihat beberapa elemen yang dipandang akses oleh kedua narasumber, namun bagi peneliti yang merupakan pengguna kursi roda tidak akses terutama saat beraktivitas sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dengan ragam yang sama, tapi kondisi fisik berbeda dapat memiliki perbedaan aksesibilitas dan kebutuhan, dapat memberikan penilaian dan pendapat berbeda terhadap tingkat akses dan kemudahan lingkungannya.

c. Kelompok 3

Kelompok 3 dipandu oleh peneliti Chandrezky Permatasari dari Universitas Mercu Buana (UMB). Narasumber yang diwawancarai adalah salah satu dari komisioner KND Rachmita Maun Harahap. Narasumber merupakan seorang penyandang disabilitas rungu/Tuli. Pada sesi wawancara yang berjalan selama $\pm 1,5$ jam, peneliti dibantu oleh dua mahasiswa Cika Putri dan Anggina untuk mendokumentasikan dan membuat catatan. Hasil wawancara narasumber terhadap aksesibilitas di ruang KND sebagai seorang disabilitas rungu/Tuli.

Saat beraktivitas di kantor KND, narasumber dibantu oleh pendamping juru bahasa isyarat atau (JBI) yang beliau anggap sebagai bentuk akomodasi yang layak (AYL). Meskipun demikian, narasumber tetap mengenali dengan baik lingkungan fisik tempat narasumber bekerja dan tetap dapat bekerja secara mandiri. Ruang kerja terbuka dapat mengganggu aktivitasnya karena narasumber pengguna alat bantu dengar (ABD), sehingga suara bising yang berasal dari luar ruang kerja dapat mengganggu sehingga narasumber sulit untuk berkonsentrasi bekerja.

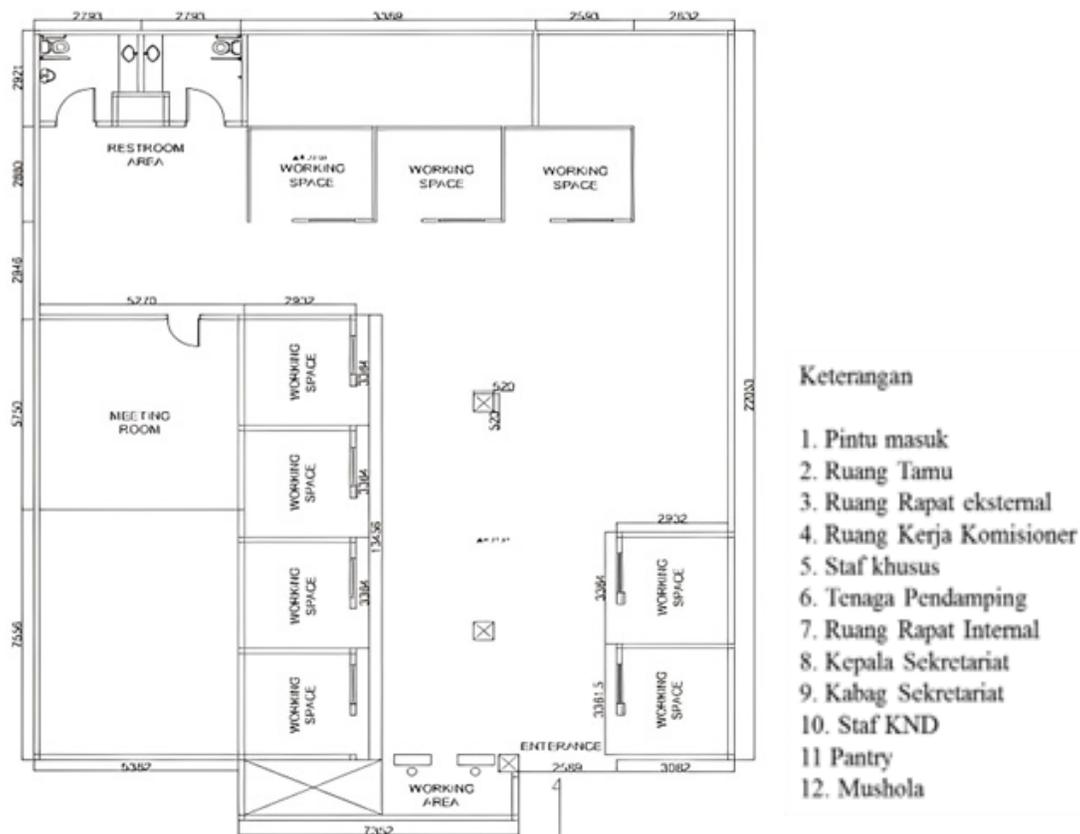
Secara garis besar hasil observasi dan evaluasi narasumber terhadap lingkungan fisik tempat bekerja dengan pendekatan *Deaf Space* adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang kerja tanpa pintu, kaca jendela dengan material transparan cukup membantu komunikasi dengan kondisi di luar ruangan terutama bila ada seseorang akan masuk ke ruang kerja narasumber. Dinding sebagian terbuka dan tidak kedap suara, sehingga sulit berkonsentrasi dalam pekerjaannya karena suara bising dari luar ruang kerja narasumber.
- 2) Perabotan meja, kursi, dan lemari sudah sesuai dengan kebutuhan narasumber
- 3) *Entrance*, tidak ada papan petunjuk/marka/symbol pintu masuk menuju lobi, sehingga narasumber dan tamu baik Tuli maupun non-Tuli akan sulit menemukan lokasi yang dituju.
- 4) Jalur koridor atau jalur pedestrian masuk ke kompleks bangunan juga tidak selalu bebas hambatan hingga ke dalam bangunan kompleks, sehingga pengguna pejalan kaki harus menggunakan area jalan kendaraan.
- 5) Lebar jalur koridor atau jalur pedestrian tidak akses, karena lebarnya hanya 90 cm. Menurut (Bauman, 2005) dan (Worrel, 2011) lebar jalur pedestrian atau jalur koridor adalah 240 cm cukup akses bagi pengguna Tuli dapat tetap berkomunikasi dengan lawan bicaranya saat berjalan dengan temannya selama perjalanan (Harahap dkk., 2020).
- 6) Pengguna Tuli tetap dapat melihat gerakan bibir atau bahasa isyarat lawan bicaranya, namun kondisi jalur pedestrian dan jalur koridor menuju kantor KND masih belum memenuhi standar aksesibilitas seperti yang dimaksud sehingga memungkinkan lawan bicara Tuli tertabrak orang lain dari arah berlawanan.
- 7) Meja rapat bukan berbentuk bundar, sehingga sulit berinteraksi atau melihat lawan bicara dengan akses visual yang sesuai dengan kebutuhan Tuli.
- 8) Penerangan atau pencahayaan yang alami cukup terang, sedangkan pencahayaan buatan yang menggunakan lampu cukup terang dan tidak redup.
- 9) Warna sudah sesuai dan material dinding polos atau tidak bertekstur sehingga narasumber dapat berkonsentrasi dengan lawan bicara.
- 10) Kamar mandi dan tempat wudhu cukup luas dan dapat bergerak. Pintu buram cukup membantu komunikasi dari luar kamar mandi bila kunci pintunya tidak bisa dibuka.
- 11) Belum terpasang alarm bel visual yang berkedip-kedip bertanda darurat atau bencana sehingga narasumber sulit mendapatkan informasi keadaan darurat.

2. Data Kondisi

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kondisi saat ini ruang kepegawaian di gedung KND bagi komisioner dan staf khusus penyandang disabilitas dapat mendorong kecenderungan terjadinya aktivitas bekerja dan berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Ruang tersebut memengaruhi perilaku penyandang disabilitas.

Gambar 1
Denah Kantor KD



Gambar 1 adalah identifikasi kondisi fisik masing-masing ruangan tersebut kecenderungan aktivitas yang terjadi, serta ruang kerja kepegawaian tersebut menggunakan konsep desain inklusif (gabungan penerapan prinsip desain universal dan prinsip deaf space)

Pada gambar 1 di atas, ruang kepegawaian di gedung KND yang terletak di Jalan Mayjen. Soetoyo, Kav.22, Cawang, Jakarta Timur. Ruang tersebut bermanfaat untuk menunjang pekerjaan baik komisioner maupun staf khusus serta unsur sekretariat KND yang semakin meningkat.

3. Data Penilaian Variabel Elemen Arsitektural

Terdapat 25 variabel untuk kriteria penilaian elemen untuk menganalisis hasil variabel elemen ruang kepegawaian di gedung KND (N=4), yakni Rangkuman Standar Aksesibilitas (RSA) pada Tabel 4 (Mujimin, 2012), Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Permen PUPR No.14/PRT/M/2017), dan faktor pemberat (*Weights Factor*), nilai faktor fungsional dan karakter dari masing-masing elemen ruang.

Tabel 3

Perbandingan Penilaian Hasil Analisis Tim Kelompok Survei

No	Variabel	W F	Tim Kelompok Survei							
			Tim 1 Dis. Netra Jonna D		Tim 2 Dis. Fisik Fatimah A.		Tim 2 Dis. Fisik Dodik P		Tim 3 Dis. Rungu Rachmita MH	
			Skor	Total	Skor	Total	Skor	Total	Skor	Total
1	Trotoar	3	4	12	3	9	2	6	2	6
2	Halte bus	3	4	12	5	15	1	3	1	3
3	Main entrance	1	3	3	5	5	3	3	4	4
4	Parkir	4	5	20	5	20	5	20	4	16
5	Kanopi	2	5	10	5	10	3	6	5	10
6	Pintu	2	5	10	5	10	5	10	5	10
7	Main hall	2	3	6	3	6	3	6	3	6
8	Inform desk	2	1	2	3	6	3	6	1	2
9	Tangga	3	4	12	5	15	4	12	4	12
10	Ramp	4	4	16	4	16	2	8	3	12
11	Ruang lift	2	1	2	3	6	3	6	4	8
12	Rest space	3	1	3	4	12	4	12	4	12
13	Jalur sirkulasi	2	5	10	3	6	3	6	5	10
14	Ruang Kerja	2	5	10	4	8	5	10	5	10
15	Ruang Rapat	2	5	10	4	8	5	10	4	8
16	Dinding ruang kerja	3	3	9	3	9	1	3	4	12
17	Pintu ruang kerja	3	4	12	3	9	1	3	1	3
18	Warna dan material Interior	4	5	20	4	16	4	16	5	20
19	Pencahayaan	4	5	20	4	16	4	16	5	20
20	Toilet	4	5	20	5	20	5	20	5	20
21	Mushola	2	2	4	3	6	3	6	1	2
22	Pantry	2	5	10	4	8	3	6	5	10
23	Kantin	1	1	1	3	3	4	4	3	3
24	Ruang ATM	4	5	20	5	20	5	20	3	12
25	Bel Alarm Darurat	3	1	3	5	15	1	3	1	3
			91	270	100	272	82	221	87	234
Skor total:			2,96		2,72		2,69		2,689	
Kriteria:			3		3		3		3	
Keterangan:			Aksesibilitas kurang		Aksesibilitas kurang		Aksesibilitas kurang		Aksesibilitas kurang	

Hasil penilaian pada Tabel 4 di atas, menunjukkan skala penilaian 1 hingga penilaian 5 yang menjadi skor awal kemudian dikalikan dengan bobot nilai masing-masing variabel elemen ruang. Bobot nilai faktor pemberat (Weights Factor) diurutkan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan (angka 4 menandakan elemen tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dan untuk memenuhi kebutuhan utama penyandang disabilitas).

Pada elemen-elemen ruang kepegawaian di gedung KND berjumlah 25 (N=25), hanya terdapat 11 (11/N=25) ruang kepegawaian tersebut aksesibilitas cukup walaupun belum sempurna. Namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar ruang kepegawaian ini aksesibilitas kurang. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa elemen yang berkaitan dengan kemudahan penyandang disabilitas terutama bagi disabilitas daksa yang menggunakan alat bantu gerak, di antaranya ramp, toilet, kantin, dan koridor antar ruang. Disabilitas netra yang menggunakan tongkat di antaranya trotoar atau koridor antar ruang, dinding dan pintu ruang kerja, toilet, dan kantin. Disabilitas rungu/Tuli di antaranya lebar trotoar atau koridor antar ruang, meja ruang rapat, dinding dan pintu ruang kerja, kantin, serta papan petunjuk darurat. Elemen-elemen tersebut belum memenuhi standar konsep desain inklusif melalui prinsip desain universal dan prinsip deaf space, maka akan sangat menyulitkan bagi penggunaanya dalam memenuhi kebutuhannya.

4. Hasil Diskusi

Berdasarkan hal di atas, permasalahan konsep baik ruangan dan lingkungan yang ramah terhadap pengguna terutama bagi penyandang disabilitas di gedung KND masih cukup kompleks. Hal ini terlihat dari hasil observasi, banyak aspek dan elemen arsitektural di ruang kepegawaian ini masih belum memenuhi prinsip desain universal dan prinsip deaf space bagi ragam penyandang disabilitas. Permasalahan ruangan dan lingkungan terutama bagi narasumber disabilitas fisik, netra dan Tuli, dapat diberikan beberapa beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a. Aspek lingkungan luar dan sekitar bangunan

Hal yang paling disoroti oleh partisipan adalah kualitas jalan pedestrian dari luar bangunan menuju tapak bangunan yang kurang memenuhi aspek aksesibilitas, keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas terutama fisik, netra, dan Tuli. Kondisi jalan pedestrian di depan kompleks bangunan di Jl. Mayjen Sutoyo tidak memiliki kualitas yang sama dimana sisi Barat jalan memiliki kondisi baik dan akses, namun sisi Timur jalan memiliki kondisi kurang terawat dan sulit diakses terutama bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas lain. Jalan trotoar di sebelah Barat cukup memiliki kelengkapan jalan dan prinsip kemudahan serta aksesibilitas termasuk berkaitan dengan furnitur jalan trotoar, material penutup jalan, informasi tanda lalu lintas dan jalan, tanda/symbol serta dimensi lebar jalan. Namun, di sisi lainnya kondisi jalan masih sempit dan kurang memiliki kelengkapan tanda/symbol jalan serta material yang kurang terawat, dan sulit dilalui oleh pengguna kursi roda karena lebar jalan pedestrian yang sempit. Prinsip dan usulan desain jalan pedestrian didapatkan secara lengkap pada Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. (Permen PUPR RI No.14/PRT/M/2017).

Pada Gambar 2,3, dan 4 menunjukkan prinsip rencana dan desain jalur pejalan kaki yang menghubungkan lingkungan luar bangunan ke dalam bangunan. Aspek penting dari penyediaan desain dan kelengkapan dari jalur pejalan kaki adalah pentingnya ubin pemandu dan tanda atau simbol bagi pengguna netra dan kondisi serta dimensi jalan yang sesuai untuk pengguna disabilitas fisik. Aspek teknis juga mencakup posisi dan adanya furnitur jalan (bangku istirahat, tiang listrik, ram menuju bangunan, bak sampah dan lain sebagainya) yang dirancang sesuai aturan dan prinsip teknis.

Pada Gambar 5 menunjukkan rancangan jalur pejalan kaki pengguna Tuli menggunakan prinsip *deaf space*. Menurut Worrel (2011) jarak lebar koridor minimal 2,8 m sesuai ukuran pengguna Tuli menggunakan tangan bahasa isyarat (Worrel, 2011).

Jalur pejalan kaki. Pada Gambar 5 menunjukkan prinsip desain universal, contoh prinsip jarak lebar koridor sesuai ukuran pengguna kursi roda saat berjalan dengan arah berlawanan pejalan kaki. Pada Gambar 6 menunjukkan prinsip desain universal, contoh jarak lebar koridor dan prinsip perencanaan jalur pemandu (*guiding block*).

Gambar 2, 3, dan 4

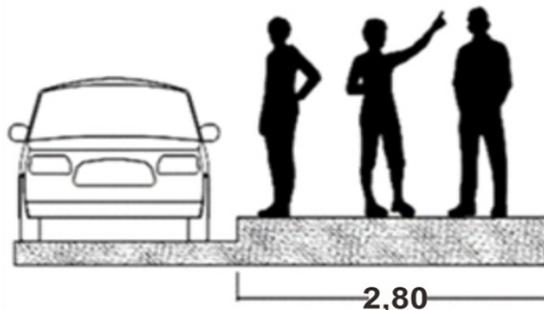
Trotoar pejalan kaki ke arah pintu masuk di sisi kanan dan di sisi kiri pintu luar tidak tersedia trotoar. Sirkulasi dari luar hingga pintu masuk tidak difasilitasi *guiding block*.



(Dok. Pribadi, 2022)

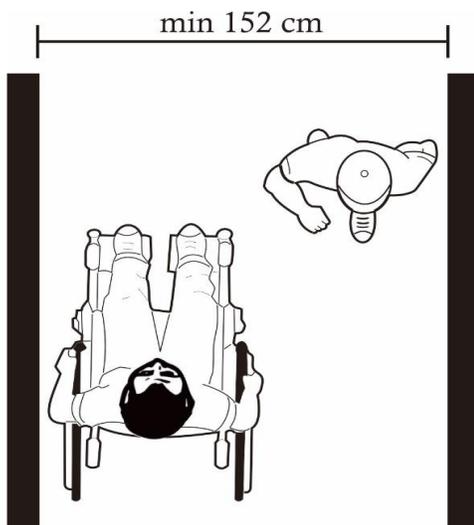
Gambar 5

Contoh jarak lebar koridor min 2,8 m sesuai ukuran pengguna Tuli menggunakan tangan bahasa isyarat



Gambar 6

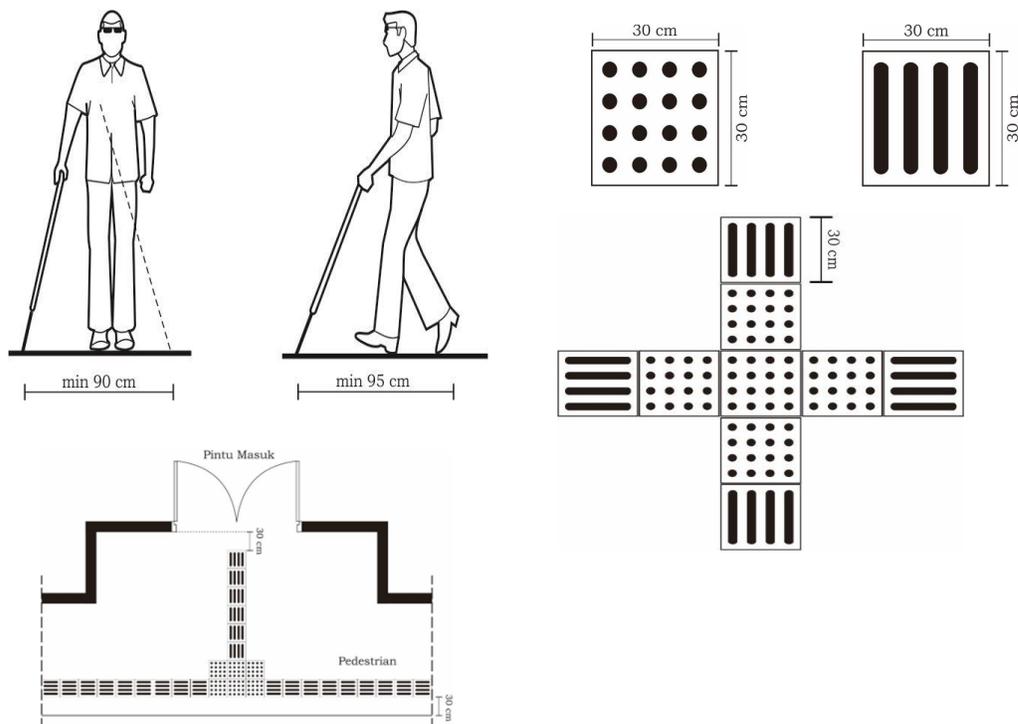
Contoh jarak lebar koridor yang efektif bagi pengguna kursi roda berjalan dengan arah berlawanan pejalan kaki



Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

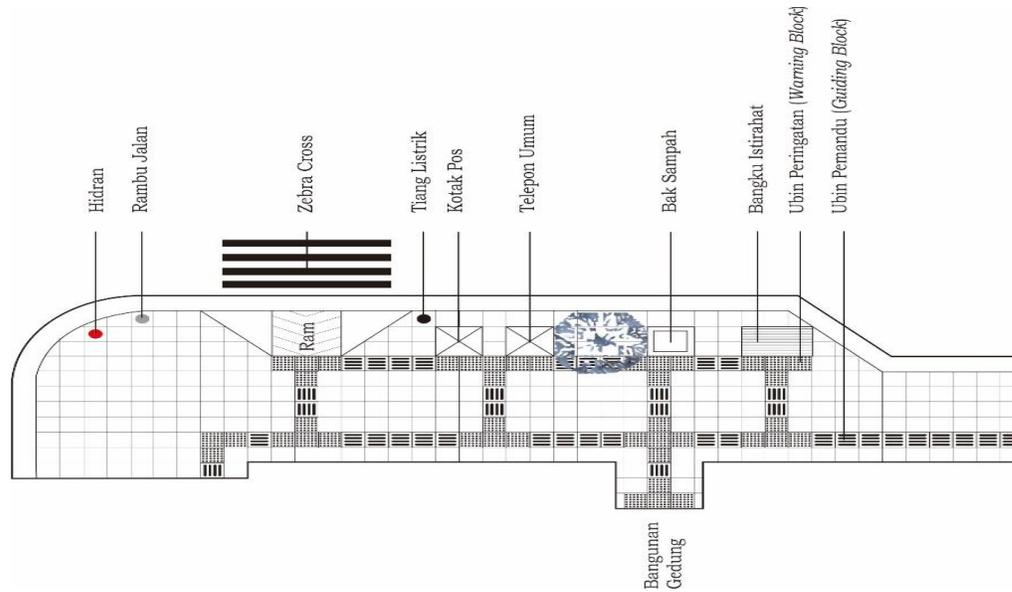
Gambar 7

Contoh Prinsip perencanaan jalur pemandu dan jarak lebar koridor sesuai ukuran pengguna dengan disabilitas netra menggunakan tongkat. Ubin peringatan petunjuk arah lurus dan berputar



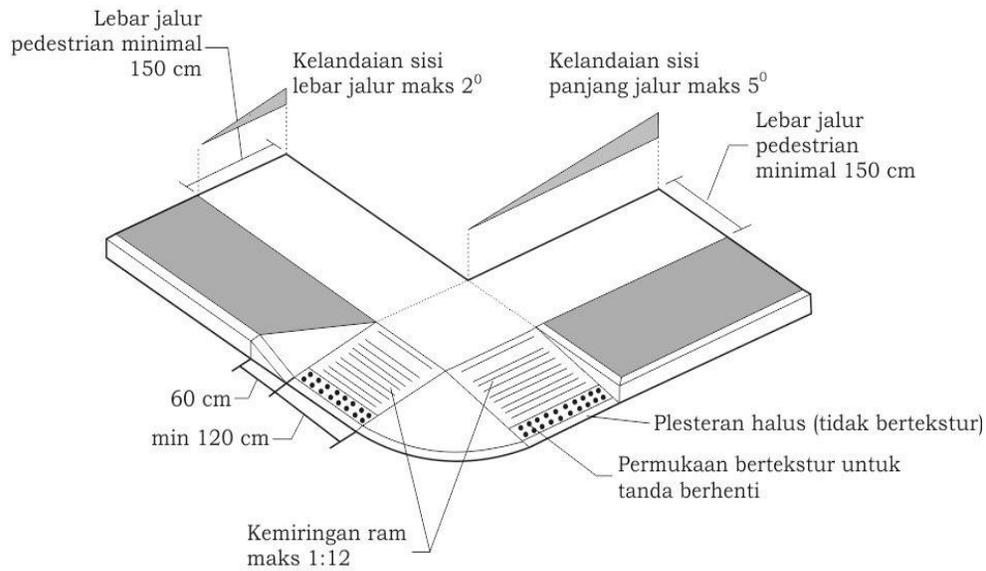
Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Gambar 8
Contoh desain jalur pejalan kaki



Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

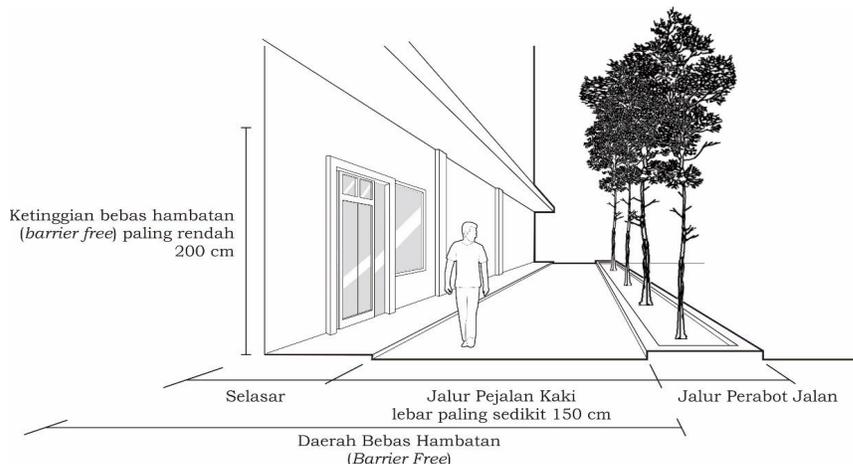
Gambar 9
Prinsip rancangan jalur pejalan kaki dan guiding block



Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Gambar 10

Contoh selasar dengan 1 (satu) dinding pembatas



Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Pada Gambar 8, 9 dan 10 di atas, pentingnya mempertimbangkan perbedaan ketinggian antara pintu masuk bangunan dari permukaan lantai dari jalan pedestrian. Perlu disediakan *ramp* dengan perbandingan maksimal 1:12 untuk mempermudah pengguna kursi roda, ubin pemandu bagi penyandang disabilitas netra dan keberadaan tanda serta simbol informasi yang jelas bagi pengguna Tuli.

b. Aspek bangunan dan interior

Hal ini perlu dipertimbangkan adalah kemudahan dan aksesibilitas pada pintu utama atau masuk utama. Hal ini tidak hanya harus disediakan *ramp* yang memiliki kemiringan sesuai standar teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi, lebar, posisi dan kelengkapan ramp. Pintu masuk juga perlu dipertimbangkan beberapa aspek termasuk lebar, posisi, material dan sistem operasional pintu yang disarankan otomatis (Gambar 5, 6, dan 7).

Selain itu, bagi pengguna dengan disabilitas netra, pintu masuk selain dilengkapi oleh ubin peringatan saat akan masuk ke dalam bangunan, perlu juga diberikan tanda/informasi berupa garis horisontal dengan warna mencolok/kuning dan sumber suara untuk mempermudah penyandang disabilitas netra melakukan navigasi ruang. Kelengkapan pintu masuk ini juga penting bagi Tuli yang membutuhkan informasi tanda/symbol sebagai salah satu kemudahan bernavigasi (Gambar 7).

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah sarana hubungan vertikal *lift* dan tangga. Tangga perlu dirancang sesuai dengan panduan teknis terutama posisi tangga, dimensi dan ketinggian anak tangga, material, profil tangga/*handrail*, *bordes*, ubin peringatan dan sebagainya (Gambar 19).

Ramp juga perlu diberikan jika tidak terdapat lift atau antar lantai memiliki ketinggian berbeda. Ramp bisa menggunakan portable ramp maupun yang memang dirancang dan dihadirkan dalam bangunan (Gambar 17). Hal penting dalam merancang ramp adalah lebar, presentase kemiringan, bahan material penutup lantai ramp, kelengkapan furnitur ramp termasuk handrail yang memiliki desain dan material khusus agar mudah diakses dan digunakan oleh pengguna kursi roda khususnya.

Pada aspek penataan dan kelengkapan furnitur interior, perlu dipilih desain-desain furnitur yang sudah memiliki prinsip ergonomi dan antropometrik yang sesuai dengan pengguna termasuk penyandang disabilitas. Beberapa furnitur memiliki kemungkinan ditata dan dirancang khusus jika pengguna memiliki kebutuhan khusus. Prinsip dan panduan tentang penyediaan furnitur dan kelengkapan aspek-aspek desain dalam interior dapat juga merujuk Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. (Permen PUPR RI No.14/PRT/M/2017).

Hal lain yang terpenting adalah desain toilet yang perlu mempertimbangkan dimensi ruang, jenis material lantai, posisi dan dimensi perabot toilet, serta keterhubungan antar perabot. Pada umumnya desain toilet hanya fokus pada luas area toilet dan lebar pintu masuk yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas serta mampu melakukan manuver. Prinsip ini tidak akan cukup jika belum mempertimbangkan posisi dan dimensi perabot di dalam toilet serta bagaimana jarak dan keterhubungan antar perabot (Gambar 20a dan 23).

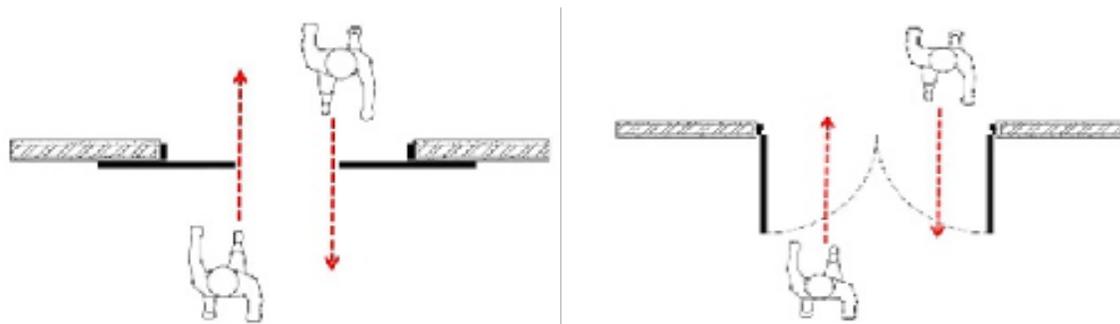
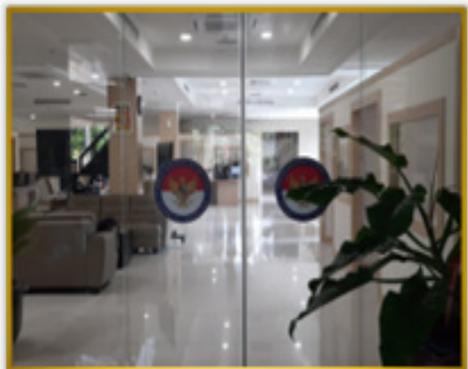
Gambar 11 dan 12

Pintu masuk otomatis dengan material kaca gedung KND dan contoh desain penggunaan warna kontras dan penanda lain pada pintu bagi penyandang disabilitas sesuai Permen PUPR no. 14 thn 2017



Gambar 13 dan 14

Pintu masuk otomatis dengan daun pintu bahan kaca dan lebar jalur koridor sudah sesuai dengan pengguna Tuli mudah berkomunikasi dari luar dan contoh desain pintu otomatis berturut-turut di ruang depan, jika diletakkan berdekatan, agar percakapan dapat terus menerus (berkomunikasi sambil berjalan) sesuai Permen PUPR no. 14 thn 2017



Gambar 15 dan 16

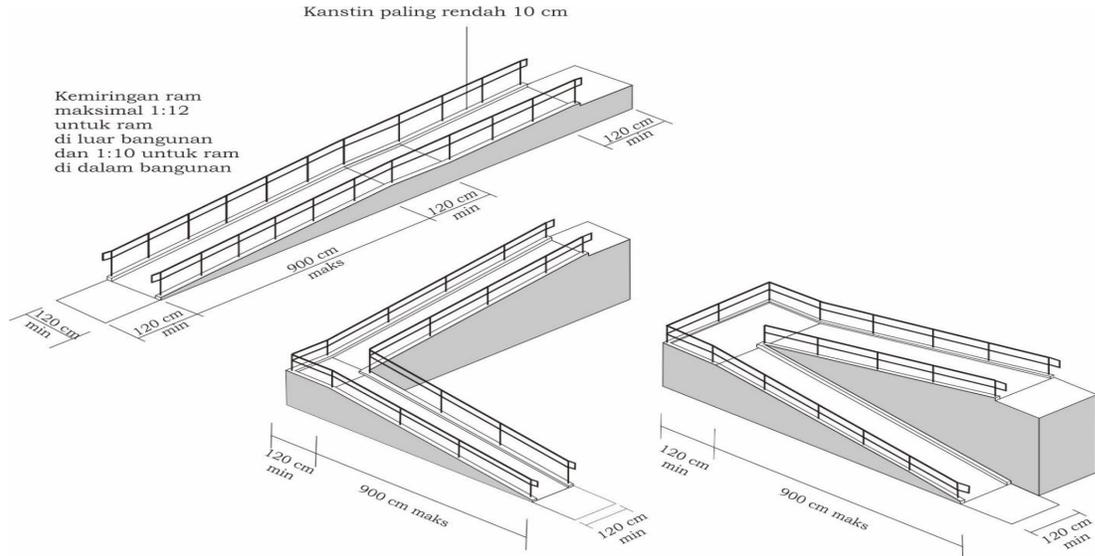
Bidang miring (*ramp*) di sisi kiri dari pintu masuk dan Bidang miring (*ramp*) di sisi kiri dari pintu masuk



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 17

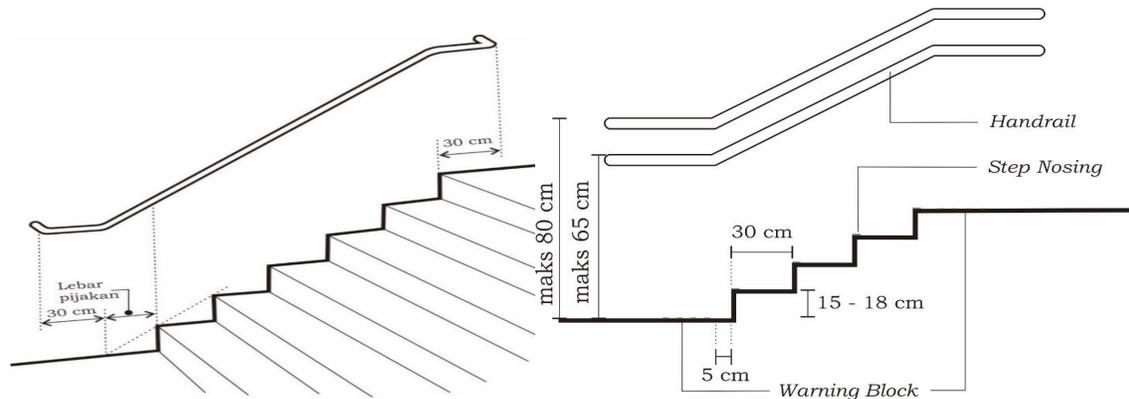
Contoh variasi desain ramp dalam hal penentuan dimensi dan kemiringan permukaan lantai



Sumber:Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Gambar 18 dan 19

Tangga menuju lantai atas dan contoh desain teknis tangga dan kelengkapannya sesuai Permen PUPR no. 14 thn 2017



Gambar 20a dan 20b

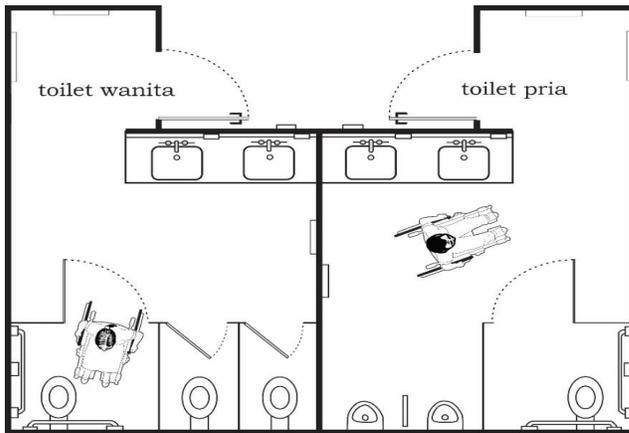
Posisi wastafel tanpa disertai ruang dibawah sulit untuk pengguna kursi roda dan Closet duduk dekat kran air



Sumber: Dokumen pribadi

Gambar 21

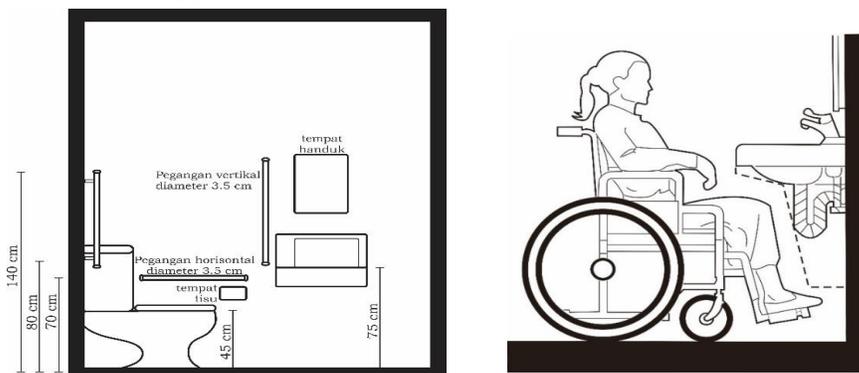
Contoh denah toilet yang setidaknya menyediakan 1 (satu) toilet bagi pengguna dengan disabilitas



Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Gambar 22 dan 23

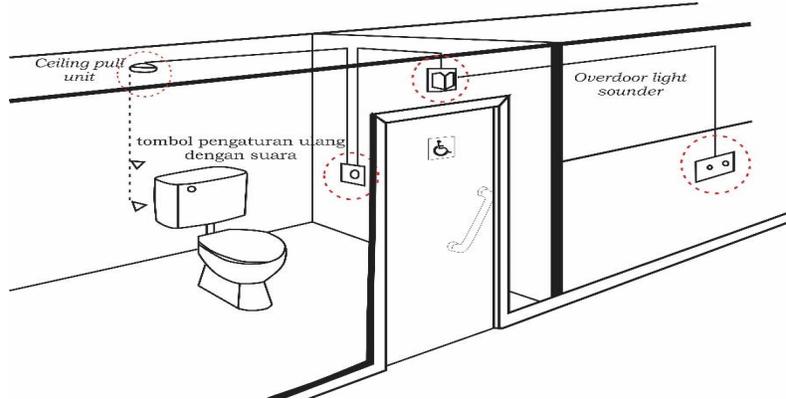
Contoh desain potongan toilet penyandang disabilitas dan desain perletakan bak cuci tangan memudahkan mobilitas oleh pengguna kursi roda



Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2017

Gambar 24

Mekanisme *panic button* pada toilet penyandang disabilitas sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2017



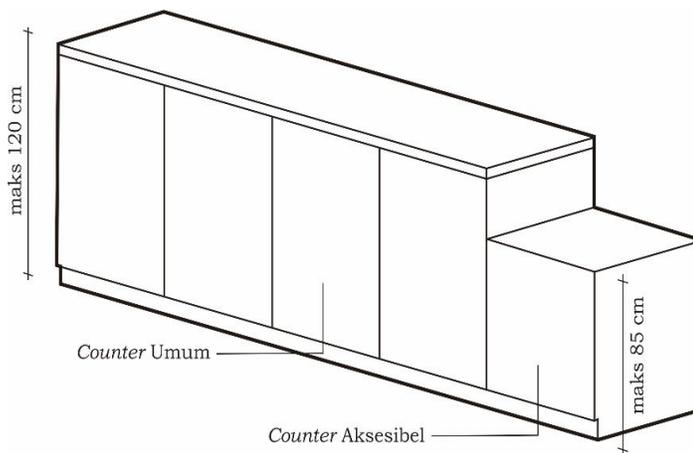
Gambar 25

Ruang resepsionis di kantor KND tidak terlihat



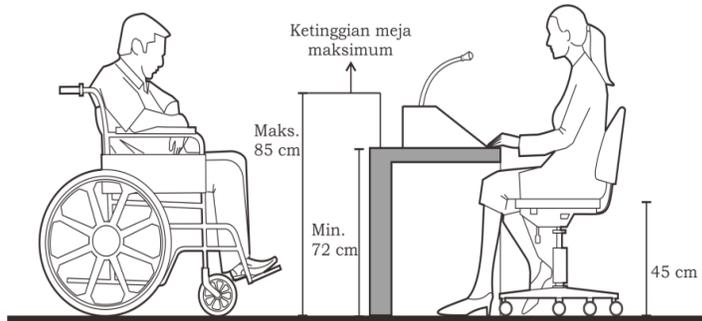
Gambar 25

Desain meja counter aksesibel sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2017



Gambar 26

Dimensi meja resepsionis atau pusat informasi tinggi sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2017



Selain permasalahan di atas, hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa ruang kepegawaian di Gedung KND dalam penerapan prinsip deaf sace yang dimanfaatkan oleh komisioner Tuli untuk melakukan aktivitas baik bekerja maupun berinteraksi sosial dengan lingkungannya, adalah sebagai berikut:

- *Entrance* area, tidak terdapat papan petunjuk mengarah pada yang akan dituju.
- Parkir area khusus bagi penyandang disabilitas hanya 1 padahal komisioner disabilitas ada 4 orang.
- Lebar trotoar 90 cm, lebar ini memungkinkan terjadi tabrakan dari arah berlawanan ada saat pengguna Tuli berkomunikasi dengan melihat visual gerakan bibir lawan bicara dan trotoar hanya terbatas sampai pos satpam.
- Tidak ada koridor dan juga tanpa peneduh, terletak di jalan suatu bangunan, tidak terdapat pelindung dari sinar matahari dan hujan serta angin kencang.
- *Drop off*, ada penutup kanopi, tidak halangan bagi pengguna dengan disabilitas.
- Ruang kerja terbuka tanpa pintu, tinggi dinding di sisi kanan dan kiri tidak menutup hingga ke plafon/berupa sekat. Begitu juga dengan dinding bagian depan tidak menutup hingga ke plafon. Dinding bagian ini terbuat dari material kaca. material transparan seperti kaca memungkinkan orang di dalam ruang kerja dapat melihat ke arah luar, pintu masuk, ruang tamu, ruang rapat, ruang sekretariat, dan kehadiran orang lain/komisioner lain.
- Tanpa pintu, kondisi ini membuat suara dari luar masuk ke dalam ruang dan

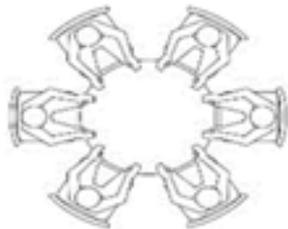
ditangkap telinga narasumber dengan disabilitas rungu yang merupakan pengguna alat bantu dengar (ABD) sehingga membuat narasumber sulit berkonsentrasi bekerja dan harus melepas ABD. Pada prinsip *deaf space*, seharusnya terdapat peredam suara dalam ruangan yang digunakan oleh pengguna dengan disabilitas rungu sehingga suara bising yang berasal dari luar ruangan dapat diredam dan tidak mengganggu penghuni di dalam ruangan terutama jika penghuni di dalam ruangan merupakan orang dengan disabilitas rungu (Worrel, 2011).

- Perabotan di dalam ruang kerja didesain dengan prinsip *deaf space* yang dapat digunakan dengan nyaman untuk duduk dan aktivitas lainnya.
- Perabotan meja ruang rapat eksternal berbentuk oval belum sesuai dengan prinsip *deaf space*. Desain meja rapat yang sesuai dengan prinsip *deaf space* seharusnya berbentuk bulat. Kondisi ini mengharuskan narasumber dan atau pengguna dengan disabilitas rungu harus menoleh ke kanan dan ke kiri agar dapat berkomunikasi (melihat gerak bibir) lawan bicara yang duduk di samping kanan dan kirinya, untuk mengatasi kondisi ini, narasumber harus didampingi oleh Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang membantu menerjemahkan.
- Perabotan meja ruang rapat internal berbentuk ellips sesuai dengan prinsip *deaf space* cukup aksesibel bagi pengguna dengan disabilitas rungu, pengguna dengan disabilitas rungu dapat menangkap visual ketujuh komisioner lain saat rapat dilakukan di meja tersebut.
- Toilet, pintu kaca buram sesuai dengan prinsip *deaf space* yang dapat memudahkan pengguna mengetahui jika ada orang di luar toilet.
- Pencahayaan dan warna, sudah sesuai dengan prinsip *deaf space*. Pencahayaan diatur cukup terang dan tidak redup di seluruh ruangan sehingga yang mudah untuk melihat ke seluruh ruangan. Material yang digunakan untuk dinding tidak bertekstur dan dicat dengan warna polos. Kondisi pencahayaan dan warna dinding yang polos menjadikan pengguna dapat dengan nyaman berkomunikasi dan menghindari kelelahan saat berisyarat.
- Belum terpasang bel alarm visual berupa lampu berkedip di seluruh ruangan.
- Ruang *mushola*, terhalang pintu masuk, memungkinkan jika seseorang melewati arah kiblat di depan seseorang sedang melaksanakan salat.

- *Pantry*, tidak terhalang sesuai dengan prinsip *deaf space* sehingga dapat melihat seseorang yang akan memasuki ke ruangnya.
- Kantin, terletak di sebelah gedung tempat ruang kerja komisioner berada. Kantin terletak di lantai *basement* berdekatan dengan area parkir motor sehingga gelap. Kondisi gelap ini tidak cukup aksesibel bagi pengguna dengan disabilitas rungu.
- Kemudahan mendapatkan informasi bagi pengguna dengan disabilitas rungu dibantu Akomodasi yang Layak (AyL) atau pendamping yang membantu penerjemah bahasa isyarat. Keberadaan AyL merupakan bagian dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai bentuk pemberian akses layanan penyandang disabilitas terhadap ruang kerja (Erissa & Widinarsih, 2022).

Gambar 27

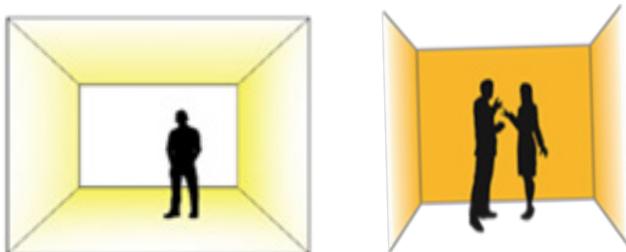
Contoh penerapan desain meja rapat sesuai prinsip *deaf space*



Sumber: Prinsip *deaf space* (Worrel, 2011)

Gambar 28

Contoh desain dinding dengan warna polor dan tidak bertekstur sesuai prinsip *deaf space*



Sumber: Prinsip *deaf space* (Worrel, 2011)

Gambar 27

Contoh penerapan desain ruangan dengan peredam suara sesuai prinsip *deaf space*



Narasumber dengan disabilitas rungu sekaligus salah satu komisioner KND, dalam melakukan aktivitas bekerja, rapat rutin, diskusi dan lainnya serta berinteraksi sosial lebih banyak dilakukan di ruang-ruang tertentu, yaitu di ruang kerja dan ruang rapat. Narasumber dengan disabilitas rungu lebih mengandalkan indra penglihatan (mata) memilih ruang yang terbuka dan dekat dengan sirkulasi utama di tengah ruang bersama karena memudahkan akses visual. Narasumber dengan disabilitas rungu lebih mementingkan faktor visibilitas, aksesibilitas, kenyamanan dan kemandirian. Hal ini terlihat dominan saat narasumber dengan disabilitas rungu beraktivitas dan bekerja. Narasumber dengan disabilitas rungu lebih memilih menunggu di ruang kerja sambil mengerjakan tugas-tugasnya. Pada saat jadwal rapat baik internal maupun eksternal, narasumber dengan disabilitas rungu menuju ke ruangannya bersama pendamping AYL untuk membantu menerjemahkan pembicaraan verbal/lisan ke dalam bahasa isyarat, serta staf khusus membantu notulensi, mencatat dan menyampaikan informasi jadwal kegiatan.

Perlunya menyediakan aksesibilitas ruang kepegawaian bagi komisioner dengan disabilitas rungu/Tuli dengan penerapan prinsip deaf space untuk memudahkan aktivitas saat bekerja dan berinteraksi sosial di lingkungan bangunan pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan atribut. Perlu mempertimbangkan perencanaan ulang terhadap desain ruang kepegawaian di gedung KND pada bagian dinding dan pintu serta trotoar dibantu alat peneduh, koridor antar ruang lebarnya sesuai dengan prinsip deaf space minimal 2,80 m dan maksimal 3,60 m. Bahkan juga pada teras dan selasar bangunan KND, seharusnya dapat dikembalikan pada fungsi utama sebagai ruang penerima dan jalur sirkulasi.

D. Kesimpulan

Penataan ruang kepegawaian di gedung KND masih belum sepenuhnya memenuhi standar desain inklusif sesuai PUPR No.14/PRT/M/2017 dan prinsip *deaf space*. Pelaksanaan renovasi ruang kepegawaian KND dilakukan setelah pelantikan komisioner KND sehingga memberikan cukup waktu menerima masukan dan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan komisioner atau pengguna dengan disabilitas. Usulan dan rekomendasi terkait penataan ruang kepegawaian KND agar memenuhi standar desain inklusif telah disampaikan sebelum renovasi dilaksanakan. gambaran-gambaran terkait akses yang dibutuhkan dalam ruang kepegawaian KND juga telah disampaikan, Akan tetapi, penerapan desain inklusif yang aksesibel bagi pengguna khususnya komisioner KND yang bekerja dan beraktivitas di ruang tersebut belum optimal. Hanya sebagian kecil dari seluruh prinsip desain inklusif berdasarkan PUPR No.14/PRT/M/2017 dan *deaf space* yang diterapkan, khususnya untuk penerapan prinsip *deaf space* untuk penyandang disabilitas rungu hanya sekitar 1% yang diterapkan, padahal hak atas aksesibilitas sudah dijamin dalam UU No. 8 tahun 2016.

Berdasarkan hal di atas, ada beberapa elemen terkait dengan desain universal dan *deaf space* yang wajib diterapkan secara optimal, sehingga penyandang disabilitas dapat mengakses tempat kerja secara mandiri dan bekerja lebih produktif. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait mulai dari perusahaan penyedia jasa konstruksi, arsitek/*designer* dan pengelola bangunan harus lebih memerhatikan prinsip desain inklusif yang ramah bagi semua kalangan khususnya di gedung dan ruang kepegawaian KND dapat lebih ramah dan memerhatikan kebutuhan akses penyandang disabilitas. Pihak-pihak terkait dapat menerepkan pedoman aturan dalam pemberian aksesibilitas pada bangunan fisik yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan Permen PUPR No.14/PRT/M/2017 sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu aksesibilitas. Mulai dari pemerintah, masyarakat, perusahaan/swasta, akademisi, media, arsitek/*designer* dan pengelola bangunan dapat memahami prinsip aksesibilitas.

E. Pengakuan

Penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M), Universitas Mercu Buana Jakarta tahun 2022.

F. Referensi

- Bauman, H. (2005). *DeafSpace—Campus Design and Planning* [Universitas]. Gallaudet University. <https://gallaudet.edu/campus-design-facilities/campus-design-and-planning/deafspace/>
- Bonaccio, S., Connelly, C. E., Gellatly, I. R., Jetha, A., & Martin Ginis, K. A. (2020). The Participation of People with Disabilities in the Workplace Across the Employment Cycle: Employer Concerns and Research Evidence. *Journal of Business and Psychology*, 35(2), 135–158. <https://doi.org/10.1007/s10869-018-9602-5>
- Cresswell, J. W., & Fawaid, A. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Doudin, B. (2010). *Deaf architecture: Hearing Loss, Space, Lighting and Sign Language*. [Pendidikan]. Scribd. <https://www.scribd.com/presentation/39436945/DEAF-Architecture>
- Erissa, D., & Widinarsih, D. (2022). Akses Penyandang Disabilitas terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027>

- Goldsmith, S. (2000). *Universal Design: A Manual of Practical Guidance for Architects*. Architectural Press. http://archive.org/details/UNIVERSAL_DESIGN
- Harahap, R. M., & Lelo, L. (2020). Pengalaman Mahasiswa Tuli di Ruang Komunal Universitas Mercu Buana. *INKLUSI*, 7(2), Art. 2. <https://doi.org/10.14421/ijds.070201>
- Harahap, R. M., Santoso, I., Wahjudi, D., & Martokusumo, W. (2020). Study of Interi-
ority Application in Deaf Space Based Lecture Space: Case study: The Center of
Art, Design & Language in ITB Building. *Journal of Accessibility and Design for
All*, 10(2), Art. 2. <https://doi.org/10.17411/jacces.v10i2.245>
- Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapat-
kan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar
Keadilan*, 12(1), 21–34. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164>
- Mace, R. L., Hardie, G. J., Place, J. P., North Carolina State University, & Center for
Universal Design. (1991). *Accessible Environments: Toward Universal Design*.
Center for Universal Design, North Carolina State University.
- Mujimin, W. M. (2012). Penyediaan Fasilitas Publik Yang Manusiawi Bagi Aksesibili-
tas Difabel. *Dinamika Pendidikan*, 14(1). <https://eprints.uny.ac.id/5026/>
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Pen-
yandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225–232.
- Steinfeld, E., & Maisel, J. (2012). *Universal Design: Creating Inclusive Environments*
(1st edition). Wiley.
- Story, M. F., Mueller, J. L., & Mace, R. L. (1998). *The Universal Design File: Design-
ing for People of All Ages and Abilities*. Revised Edition. Center for Universal
Design, NC State University. <https://eric.ed.gov/?id=ED460554>
- Worrel, R. A. (2011). *Architectural Communication Accessibility for the Deaf and
Hard-of-Hearing in Office Buildings*. The Catholic University of America.

